

MEMBANGUN DEMOKRASI BERKUALITAS MELALUI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PILKADA SERENTAK 2024

FITRA MULYAWAN, ZENNIS HELEN

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

fitramulyawan@gmail.com

***Abstract** Participatory oversight is a crucial element in building a quality democracy, especially in the 2024 simultaneous regional elections. This article examines the role of participatory oversight in ensuring transparency, accountability, and integrity in the electoral process. The method used is descriptive qualitative analysis with a literature study approach and secondary data from previous election monitoring reports. The article finds that community participation in election monitoring can prevent violations, increase public trust and strengthen the legitimacy of election results. Recommendations include community capacity building, socialization of participatory monitoring, and collaboration between election administrators and civil society.*

***Keywords:** Democracy, Participatory Supervision, Simultaneous Regional Elections 2024, Transparency, Accountability.*

Abstrak Pengawasan partisipatif merupakan elemen krusial dalam membangun demokrasi yang berkualitas, terutama pada Pilkada Serentak 2024. Artikel ini mengkaji peran pengawasan partisipatif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pemilu. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan data sekunder dari laporan pengawasan pemilu sebelumnya. Artikel ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat mencegah pelanggaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas masyarakat, sosialisasi pengawasan partisipatif, dan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sipil.

Kata Kunci: Demokrasi, Pengawasan Partisipatif, Pilkada Serentak 2024, Transparansi, Akuntabilitas.

A. Pendahuluan

Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai instrumen politik untuk memilih kepala daerah, pilkada harus berjalan secara demokratis, jujur, dan adil. Dalam hal ini, pengawasan partisipatif memiliki peran strategis untuk memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas pemilu dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemantauan, yang tidak hanya memberdayakan mereka untuk mengekspresikan aspirasi, tetapi juga mencegah pelanggaran seperti manipulasi suara dan pelanggaran administratif. Keterlibatan masyarakat ini memungkinkan pelaporan pelanggaran, mendorong budaya akuntabilitas, serta memperkuat kesadaran dan kepedulian terhadap integritas demokrasi (Sutarno, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti platform crowdsourcing, pengawasan partisipatif semakin efektif, sebagaimana terlihat dalam inisiatif *Uchaguzi Wetu* 2015 di Tanzania, yang memfasilitasi pengumpulan informasi dan meningkatkan pendidikan serta mobilisasi pemilih (Shayo & Kersting, 2017; Bailard & Livingston, 2014). Studi menunjukkan bahwa pemantauan partisipatif dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan memotivasi tanggapan lebih baik dari pejabat pemilu, sehingga

memperbaiki pengalaman pemilihan secara keseluruhan (Bailard & Livingston, 2014). Namun, tantangan seperti isu privasi dan keterbatasan teknologi perlu diatasi untuk memaksimalkan efektivitas pengawasan ini, dengan tetap menyeimbangkan keterlibatan masyarakat dan kebutuhan akan pengelolaan data yang aman serta andal.

Pengawasan partisipatif dalam pemilu merupakan mekanisme penting untuk meningkatkan integritas demokrasi dengan melibatkan masyarakat dalam memantau proses pemilu. Keterlibatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah terhadap pelanggaran, seperti manipulasi suara dan pelanggaran administratif. Partisipasi masyarakat mendorong transparansi dan integritas, memastikan proses pemilu yang adil dan kredibel (Muhamad & Hermawan, 2023), sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilihan. Berbagai pendekatan, seperti pendidikan publik dan penggunaan teknologi, dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, sementara mekanisme yang dilembagakan memungkinkan warga melaporkan dan mengawasi pemilu untuk memperkuat legitimasi proses tersebut (Satria & Rahman, 2023). Namun, meskipun potensinya besar, partisipasi publik seringkali terbatas pada angka statistik tanpa keterlibatan bermakna, dan pengawasan berbasis *crowdsourcing* dapat memunculkan bentuk keterlibatan yang terkontrol alih-alih pemberdayaan sejati. Oleh karena itu, meskipun pengawasan partisipatif krusial bagi pemilu yang kredibel, tantangan terkait kualitas keterlibatan masyarakat perlu diatasi agar manfaat demokratisnya dapat terwujud sepenuhnya.

Pelatihan dan sosialisasi masyarakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan pengawasan partisipatif selama proses pemilu. Kegiatan ini tidak hanya membangun kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat, tetapi juga membekali individu dengan keterampilan untuk mengawasi pemilu secara efektif. Komunitas yang teredukasi mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, sehingga memperkuat integritas pemilu (Pamungkas et al., 2023; Muhamad & Hermawan, 2023). Selain itu, kolaborasi antara masyarakat sipil, media, dan lembaga pemilu dapat menciptakan sinergi yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas proses pemilu (Sutarno, 2022; Suryadi, 2023). Namun, tantangan seperti resistensi birokrasi dan perlunya keterlibatan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan harus diatasi untuk memastikan pengawasan partisipatif dapat berjalan konsisten dan memberikan dampak nyata dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pengawasan partisipatif yang efektif memerlukan dukungan regulasi yang kokoh agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah memberikan landasan hukum bagi partisipasi masyarakat, namun implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peraturan teknis yang jelas dan pelaksanaan yang konsisten. Regulasi yang kuat tidak hanya mendukung keterlibatan masyarakat secara lebih luas, tetapi juga memberikan perlindungan bagi pengawas partisipatif dari berbagai ancaman atau tekanan yang mungkin muncul dari pihak-pihak berkepentingan. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan regulasi tersebut diterjemahkan secara konkret ke dalam mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat.

Pilkada Serentak 2024 menjadi ujian bagi sistem demokrasi Indonesia. Keberhasilan pengawasan partisipatif akan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan inklusif. Oleh karena itu, seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi masyarakat sipil, harus bersinergi untuk memastikan bahwa pengawasan partisipatif berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi perguruan tinggi maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam tulisan ini yaitu bagaimana konsep pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024? Untuk memberikan gambaran kajian ini secara rinci, maka masalah pokok tersebut akan diuraikan dalam beberapa sub masalah sebagai yaitu: 1) apa manfaat dan tantangan dalam implementasi pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024? 2) bagaimana strategi meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pilkada serentak 2024?

C. Hasil dan Pembahasan

Manfaat Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada Serentak 2024

Pengawasan partisipatif memberikan berbagai manfaat dalam mewujudkan demokrasi berkualitas, antara lain: Transparansi Proses. Pengawasan partisipatif memegang peran penting dalam meningkatkan transparansi proses pemilu, sehingga berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang berkualitas. Dengan melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pemilihan mulai dari penyusunan daftar pemilih hingga penghitungan suara pendekatan ini membangun lingkungan yang akuntabel dan meningkatkan kepercayaan publik. Melalui pemantauan dan pelaporan, masyarakat dapat mendeteksi dan melaporkan pelanggaran pemilu secara real-time, yang membantu mencegah praktik-praktik kecurangan (Muhamad & Hermawan, 2023). Selain itu, program pendidikan dan kesadaran yang digagas oleh badan pemilu, seperti Bawaslu, memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif (Satria & Rahman, 2023). Transparansi yang lebih baik juga dicapai melalui reformasi, seperti penggunaan cetakan digital dalam kampanye, yang memastikan kepatuhan terhadap aturan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan pemilih, meskipun tantangan dalam penerapan yang merata tetap ada (Dommett et al., 2024). Pengawasan partisipatif dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu dengan menjadikan masyarakat lebih terlibat dalam proses demokrasi (Muhamad & Hermawan, 2023). Namun, terdapat tantangan seperti rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan ketidaksesuaian dalam penerapan langkah transparansi, yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan integritas pemilu (Zukni et al., 2024; Arum, 2024). Selain itu, meskipun pengawasan partisipatif penting, beberapa pihak berpendapat bahwa reformasi kelembagaan yang lebih mendalam juga diperlukan untuk mengatasi masalah sistemik dalam proses pemilu dan memastikan praktik demokrasi yang sejati.

Peningkatan Partisipasi, pengawasan partisipatif dalam pemilu memiliki peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan memperkuat integritas demokrasi. Melalui pelibatan warga dalam memantau jalannya pemilu, individu merasa diberdayakan untuk berkontribusi pada transparansi dan kredibilitas proses demokrasi, yang pada akhirnya dapat mencerminkan kehendak rakyat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong pengawasan partisipatif guna meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi (Satria & Rahman, 2023). Generasi muda turut berperan penting sebagai pengamat yang melaporkan potensi pelanggaran, sehingga mendukung terciptanya proses pemilihan yang lebih baik (Tobing & Astutik, 2024). Selain itu, inisiatif pendidikan publik bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam pengawasan pemilu (Satria & Rahman, 2023). Namun, tantangan tetap ada, seperti pengetahuan masyarakat yang terbatas dan ketakutan untuk melaporkan pelanggaran karena risiko dampak negatif (Zukni et al., 2024; Mahyuni & Mafriana, 2023).

Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan ini menjadi kunci dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif sebagai sarana memperkuat demokrasi.

Penguatan Akuntabilitas, pengawasan partisipatif dalam pemilu memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas di antara penyelenggara pemilu, menumbuhkan budaya profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan. Dengan melibatkan kelompok masyarakat, seperti LSM dan generasi muda, dalam pengawasan, badan seperti Bawaslu dapat mendorong transparansi dan integritas proses pemilu. Misalnya, inisiatif Saka Adhyasta Pemilu Bintang berfokus pada pemantauan integritas pemilihan, sementara keterlibatan mahasiswa di Probolinggo terbukti efektif dalam meningkatkan pengawasan dan meminimalkan pelanggaran pemilu (Aprilia & Rohim, 2024). Selain itu, pengawasan partisipatif memberdayakan warga untuk melaporkan pelanggaran, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah dan S (2023), serta mendorong pendidikan pemilih melalui inisiatif seperti yang dilakukan Bawaslu Kota Blitar (Widhiandono & Ningtyas, 2023). Meski demikian, tantangan berupa rendahnya keterlibatan publik dan kompleksitas pelanggaran pemilu tetap menjadi hambatan yang harus diatasi untuk memaksimalkan potensinya dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Tantangan Dalam Implementasi Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada Serentak 2024

Tantangan dalam implementasi pengawasan partisipatif meskipun memiliki banyak manfaat, pengawasan partisipatif juga menghadapi berbagai tantangan, seperti: Minimnya Kesadaran Masyarakat, kurangnya kesadaran publik mengenai pengawasan partisipatif secara signifikan menghambat efektivitasnya dalam berbagai konteks, termasuk proses pemilu dan pengelolaan lingkungan. Kesadaran publik yang rendah membatasi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, yang seharusnya mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti dalam pemilu untuk memperkuat proses demokrasi melalui pelaporan pelanggaran (Pamungkas et al., 2023; Sutarno, 2022), atau dalam pengelolaan lingkungan, di mana kesadaran yang terbatas menghambat praktik konservasi berkelanjutan meskipun pentingnya nilai ekologis diakui (Allahyari et al., 2024). Hambatan utama untuk meningkatkan kesadaran meliputi kesenjangan pendidikan, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk terlibat secara efektif (Pamungkas et al., 2023; Allahyari et al., 2024), serta pengaruh norma dan nilai budaya yang dapat menumbuhkan sikap apatis terhadap mekanisme partisipatif (Effendi & Ali, 2023). Meski kesadaran meningkat, hambatan struktural seperti resistensi birokrasi dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi tantangan besar, sehingga diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi masalah kesadaran sekaligus kendala sistemik.

Keterbatasan Sumber Daya, pengawasan partisipatif sering kali menghadapi kendala signifikan akibat keterbatasan sumber daya, yang berdampak pada implementasi dan efektivitasnya. Organisasi masyarakat sipil dan kelompok pengawas independen, yang menjadi penggerak utama pengawasan partisipatif, sering kali beroperasi dengan anggaran yang terbatas, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam melaksanakan pelatihan sukarelawan, mengelola logistik, dan menyebarkan informasi. Selain itu, kelangkaan individu yang bersedia terlibat sebagai pengawas, terutama di daerah terpencil, semakin memperburuk situasi. Kekurangan pendanaan menghambat pelaksanaan pelatihan komprehensif dan kegiatan operasional, sementara keterbatasan jumlah pengawas terlatih di wilayah pedesaan mengurangi efektivitas pengawasan (Zukni et al., 2024). Akibatnya, pemantauan sering kali menjadi tidak efektif, seperti yang terlihat pada pengawasan partisipatif pemilu di Bintang (Zukni et al., 2024), di mana sumber daya yang minim menghasilkan pelaporan dan pemantauan yang buruk. Masalah serupa juga ditemukan dalam program dukungan setara, di mana pengawasan yang tidak memadai mengurangi

efektivitas program (MPH et al., 2024). Meskipun demikian, ada pandangan bahwa pengawasan partisipatif tetap dapat memberikan hasil positif melalui pemanfaatan keterlibatan masyarakat dan strategi inovatif yang mampu memaksimalkan dampaknya meskipun di tengah keterbatasan.

Potensi Intimidasi, intimidasi terhadap pengawas partisipatif merupakan ancaman serius bagi integritas proses demokrasi, terutama di wilayah yang bergejolak secara politik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan intervensi strategis melalui pendidikan politik, dukungan sumber daya, dan perlindungan hukum yang dapat meningkatkan ketahanan pengawas terhadap intimidasi. Inisiatif pendidikan politik, seperti kampanye kesadaran dan program pelatihan, bertujuan untuk memberdayakan pengawas dan masyarakat agar memahami hak dan tanggung jawab mereka serta membekali pengawas dengan keterampilan dalam menangani intimidasi dan melaporkan pelanggaran (Zukni et al., 2024). Dukungan sumber daya, berupa bantuan keuangan dan penggunaan teknologi canggih seperti buku besar digital (*blockchain*), juga penting untuk memastikan badan pengawas memiliki alat dan personel yang memadai (Arora, 2024). Selain itu, perlindungan hukum melalui legislasi yang lebih kuat dan kolaborasi dengan penegak hukum dapat memberikan rasa aman bagi pengawas dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Hargono et al., 2024). Namun, perlu diakui bahwa resistensi dari lingkungan politik dan kepentingan tertentu dapat menjadi hambatan dalam menerapkan reformasi untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan menjaga integritas pemilu.

Strategi Meningkatkan Pengawasan Partisipatif Dalam Pilkada Serentak 2024

Strategi meningkatkan pengawasan partisipatif untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang tepat, antara lain: Peningkatan Edukasi Publik, peningkatan pengawasan partisipatif dalam pemilihan serentak 2024 memerlukan peran aktif masyarakat yang didorong melalui pendidikan publik yang efektif. Masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mampu berpartisipasi dalam memantau jalannya pemilihan, sehingga memastikan proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kampanye yang ditargetkan dan program pelatihan yang dapat menjelaskan secara jelas pentingnya keterlibatan publik dalam proses pemilihan.

Salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat adalah melalui kampanye pendidikan publik yang dapat memperjelas peran individu dalam memantau pemilihan. Kampanye ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pemberdayaan bagi masyarakat. Program pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu di Bintan dapat dijadikan contoh yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang proses pemilihan dan pelanggaran yang mungkin terjadi (Zukni et al., 2024).

Implementasi strategi untuk meningkatkan pengawasan partisipatif ini memerlukan upaya kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Melibatkan LSM dan organisasi masyarakat dapat memperkuat jangkauan serta efektivitas kampanye pendidikan publik. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi faktor penting dalam penyebaran informasi yang luas dan interaktif. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat, membuat pembelajaran menjadi lebih mudah diakses oleh semua kalangan. Namun, meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan publik ini, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah tingkat kesadaran publik yang masih terbatas, serta variasi dalam tingkat keterlibatan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi penyelenggara pemilihan untuk terus memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan adaptasi terhadap strategi pendidikan yang telah diterapkan. Hal ini akan memastikan keberhasilan upaya meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pemilihan serentak 2024 (Arum, 2024; Hartati et al., 2024).

Kolaborasi dengan Lembaga Pemilu, kolaborasi antara lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dalam proses pemilu. Dengan mengintegrasikan pengawasan masyarakat ke dalam kerangka kerja KPU dan Bawaslu, pelanggaran pemilu dapat diidentifikasi dan dikelola dengan lebih efektif. Pendekatan terstruktur ini akan mendorong koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemilu dan masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu telah terbukti efektif, seperti yang ditunjukkan oleh inisiatif Gerakan Sosial Rakyat Pemilu yang Progresif (GSRPP) pada pemilihan umum 2014 di Indonesia. Inisiatif ini berhasil mengungkap berbagai bentuk kecurangan dalam pemilu (Suswantoro, 2017). Selain itu, asosiasi lokal seperti Rukun Tetangga memiliki peran penting dalam memerangi politik uang, terutama selama masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya dilakukan oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat melalui jaringan lokal mereka (Sudrajat et al., 2021).

Peningkatan mekanisme pengawasan juga dapat dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan kelompok masyarakat. Kolaborasi ini telah terbukti meningkatkan pemantauan dan pelaporan pelanggaran pemilu, yang menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan kelancaran proses pemilu (Jamhari et al., 2024). Selain itu, program pelatihan bagi anggota masyarakat, seperti yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah, dapat memberdayakan warga untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengawasan pemilu (Hakim, 2023). Namun, meskipun kolaborasi ini memiliki manfaat yang besar, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran publik yang masih terbatas mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu. Mengatasi tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengawasan partisipatif dapat berjalan efektif dalam pemilihan mendatang (Jamhari et al., 2024).

Penggunaan Teknologi, integrasi platform digital yang ramah pengguna dalam pemantauan pemilu menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi dan transparansi publik. Teknologi ini memberikan peluang bagi warga negara untuk melaporkan pelanggaran pemilu dan terlibat dalam proses pemilihan tanpa terhalang oleh kendala geografis maupun waktu. Dengan adanya platform digital, pelaporan dapat dilakukan secara langsung, memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan cepat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat integritas pemilu, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi. Penggunaan teknologi digital secara signifikan meningkatkan partisipasi publik. Melalui platform digital, pelaporan pelanggaran pemilu dapat dilakukan secara real-time, sehingga memungkinkan warga untuk secara aktif terlibat dalam proses pemantauan (Muhamad & Hermawan, 2023). Selain itu, inisiatif seperti teknologi "*photo quick count*" telah membuktikan efektivitasnya dalam melibatkan warga untuk mengaudit hasil pemilu, seperti yang berhasil diterapkan di berbagai negara (Long, 2022).

Teknologi juga berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepercayaan dalam proses pemilu. Teknologi berbasis internet telah terbukti mampu meningkatkan integritas pemilu, sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Alshomari, 2022). Penggunaan aplikasi khusus yang dirancang untuk pemilu dapat memperlancar komunikasi antara publik dan otoritas pemilihan, memastikan laporan pelanggaran ditindaklanjuti secara tepat waktu (Rahmawati & Munir, 2022). Namun, meskipun teknologi memberikan manfaat besar, beberapa tantangan tetap perlu diantisipasi. Salah satu kekhawatiran utama adalah keamanan dan integritas data. Platform digital harus dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan yang kuat untuk mencegah

pelanggaran keamanan siber dan melindungi data pemilu (Hadad, 2023). Selain itu, ketergantungan pada teknologi juga menghadirkan risiko seperti kerusakan peralatan atau serangan siber, yang dapat merusak kepercayaan publik jika tidak ditangani dengan baik (Alshomari, 2022). Dengan langkah mitigasi yang tepat, integrasi teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

D. Penutup

Pengawasan partisipatif memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas Pemilu Serentak 2024, karena mampu mendorong keterlibatan dan akuntabilitas publik. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat. Pengawas pemilu, khususnya Bawaslu, berperan strategis dalam menciptakan iklim pemilu partisipatif melalui kebijakan, pemantauan, dan evaluasi, yang efektif mencegah pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik. Partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen krusial untuk memastikan transparansi dan integritas proses pemilu, memberdayakan warga negara dalam melaporkan dan mengawasi pelanggaran, termasuk isu-isu seperti pemilih fiktif. Namun, tantangan seperti kualitas pemantauan yang rendah dan keterlibatan publik yang terbatas masih menjadi hambatan, yang memerlukan upaya bersama untuk menumbuhkan budaya partisipasi aktif dan kewaspadaan. Oleh karena itu, meskipun pengawasan partisipatif memiliki potensi besar dalam memperkuat demokrasi, efektivitasnya tetap bergantung pada dukungan dan komitmen semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Gunawan, Suswanto. "Participatory Institutional Approach through the Supervision of the Movement of a Million Volunteers Election (GSRPP)." *Asian Journal of Applied Sciences*, 2017: 5.
- Hargono, et. al. "Dynamics and Challenges of Democracy in Local Elections in Indonesia and the Netherlands." *Sasi*, Volume 30 Issue 1, March 2024.
- Iqbal Reza Satria dan M. Ridha Tau q Rahman. "Pengawasan Partisipatif Dan Upaya Meningkatkan Level Demokrasi Kita." *Keadilan Pemilu*, Vol. 2-2023.
- Jamhari, et. al. "The Role of the Election Supervisory Agency in Enforcement of Violations of the 2020 Simultaneous Regional Head Election in Berau Regency." *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, Vol. 3, No. 9, 2024.
- Katharine Dommett, et. al. "Making Elections More Transparent? Lessons from the Implementation of Digital Imprints at the 2024 UK General Election." *University of Sheffield*, 2024.
- Kersting, D. P. Shayo and N. "Crowdmonitoring of Elections through ICT: The Case of Uchaguzi Wetu 2015 Crowdsourcing Platform in Tanzania," 2017 Conference for E-Democracy and Open." 2017: 36-45.
- Mr. Sarthak Arora. "Challenges and Solutions in Developing Election Fraud Detection Systems in India: A Review." *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, Volume 6, Issue 5, September-October 2024.
- Nawang Mega Arum. "Analysis of Election Monitor Participation In Governance By Bawaslu In The Implementation of Elections." *Asian Journal of Social and Humanities*, Vol. 2 No. August 11, 2024.
- Norman J Coeoyate, MCRP, Marcello Maviglia, MD, MPH, Donald Hume. "The supervision gap in peer support workforce: implications for developing effective peer support programs in Native American communities." *Journal of Psychology & Clinical Psychiatry*, Volume 15 Issue 4 - 2024.

- Rudyanti Dorotea Tobing dan Sri Astutik. "The Role Of The Younger Generation In Participatory Supervision General Election In 2024." *Awang Long Law Review*, Vol. 6, No. 1, November 2023.
- Siti Delvira Zukni, dkk. "Pengawasan Partisipatif pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bintan oleh Saka Adhyasta Pemilu." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Volume. 1 No. 4 Oktober 2024.
- Tatang Sudrajat. et. al. "Collaboration of Local Election Supervisors with Neighbourhood Association (Rukun Tetangga) to Make an Antimoney Politic Community Movement During the Pandemic Covid 19." *Atlantis Press*, 2020.
- Violeta Dwi Aprilia, dkk. "Upaya Bawaslu Kabupaten Probolinggo Meningkatkan Peran Serta Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif." *Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4 No. 01, Maret 2024.
- Widya Hartati, dkk. "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengawas Kelurahan dan Desa (Pkd) dalam Rangka Pengawasan Rekapitulasi Suara pada Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Montong Gading." *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Juni 2024.